

## MASALAH PEMILU DAN STRATEGI MEMENANGKAN

Alexius Sunaryo

[alexiusunaryo@yahoo.co.id](mailto:alexiusunaryo@yahoo.co.id)

### ABSTRAKSI

Secara teoritis, politik itu luhur, karena itu adalah proses mengelola otoritas / kekuasaan / otoritas resmi, untuk membuat orang bahagia / masyarakat senang. Manajemen dimulai dari (1) cara memperoleh, dan (2) cara menggunakan otoritas itu untuk mencapai kebahagiaan bangsa dan negara. Tetapi dalam kehidupan nyata kebangsaan, yang paling menonjol adalah perjuangan untuk otoritas / kekuasaan / kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, kerabat dan kelompok mereka, sehingga yang lebih terkenal adalah praktek politik kotor. Pada tahun politik 2018, juga, baunya belum berkembang politik kotor; Beberapa contoh pelanggaran aturan hukum korupsi, diduga dengan indikasi kuat, akan digunakan untuk membeli suara (politik uang) untuk memenangkan pemilihan calon kepala daerah. Reza AA Wattimena's Tehno-Demokrat Reza AA Wattimena (1) menjalankan birokrasi dan kepemimpinan politik; (2) layanan pemenuhan kebutuhan dasar (SPP dll); (3). Pekerjaan berbasis pekerjaan yang terprogram untuk kepentingan bakat dan dalam arah pengembangan pribadi; (4) program pengembangan peran manusia di bidang pendidikan, hukum, kesehatan, yang menghasilkan sumber daya manusia modern yang manusiawi; (5) mengelola perangkat lunak dan perangkat keras mesin dan komputer berkualitas sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan; dan (6). membangun sistem keluarga yang kritis, logis, logis, rasional, dan rasional, dan semua tingkat pendidikan yang ada, ditambah dengan pengembangan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi tekno-demokratis. Sekarang mungkin masih tampak teriak di tengah lautan, tetapi akan indah pada masanya.

Kata kunci: politik, otoritas / kekuatan / kekuasaan, pilkada, korupsi, mesin dan komputer.

### ABSTRACT

*Theoretically, politics is noble, because it is the process of managing authority / official power / authority, to make people happy / society happy. The management starts from (1) how to obtain, and (2) how to use that authority to achieve the happiness of the people of the nation and state. But in the real life of the nationality, the most prominent is the struggle for authority / power / power to enrich themselves, their families, relatives and groups, so that the more famous is the dirty politics practice. In the political year of 2018, too, the odor is not already evolving the dirty politics; Some instances of violation of the rule of law of corruption, allegedly with strong indications, will be used to purchase votes (money politics) to win the election of regional head candidates. The Reza AA Wattimena's Tehno-Democrats Reza AA Wattimena (1) run bureaucracy and political leadership; (2) basic needs fulfillment services (SPP etc); (3) .programmatic job-based employment in the interest of talent and in direction of personal development; (4) a human role development program in the field of education, law, health, which produces humane modern human resources; (5) managing the software and hardware of machines and computers of quality according to the quality standards set; and (6). building a critical, logical, logical, rational, and rational system of family and all existing levels of education, coupled with the development of adequate infrastructure to carry out techno-democratic functions. Now it may still seem to shout in the middle of the ocean, but it will be beautiful in his time.*

*Keywords: politics, authority / power / power, pilkada, corruption, machine and computer.*

#### A. Pendahuluan

##### Kesan Politik itu Kotor.

Banyak pengertian tentang Pemilihan Umum, dan salah satunya dirumuskan “*secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut asas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya*”.

(<https://niasrs.wordpress.com/tag/pemilu-menurut-para-ahli/>, print, 22 – 02 - 2018, jam.08.06.). Sedangkan pengertian pemikirankonsep atau pandangan dan pemahaman tentang “politik”, masih selalu terkooptasi oleh peristiwa-peristiwa negatif atau setidaknya sering diartikan sebagai pengertian yang *realis praktis* seperti di atas, yang menjurus dan terkesan sebagai pengertian

kebanyakan yang berkembang di masyarakat akar rumput, adalah politik itu kotor. Dalam konotasi demikian, politik, diartikan sebagai upaya-upaya perebutan kekuasaan negara, bahkan untuk/dalam kerangka memenangkan perebutan kekuasaan itu, dilakukan dengan jalan menghalalkan segala jenis/macam cara apapun.

Menghalalkan segala macam cara apapun, pastilah cara yang ditempuh cenderung melawan aturan yang berlaku baik aturan yang tidak resmi dan aturan yang berlaku secara resmi/hukum, termasuk dengan jalan peperangan yang mengarah ke pembunuhan, sehingga konotasinya politik itu benar-benar kotor. Karena praktek politik yang demikian itu ada dan sering kita dengar, bahkan pengalaman sejarah masyarakat dan negara kita, menunjukkan hal demikian lengkapnya, mulai dari sejarah pergerakan NKRI yang terjadi friksi dalam merumuskan sila sila dalam pancasila, pemberontakan PRRI, Permesta, apalagi peristiwa pemberontakan PKI Madiun, dan peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September PKI. Semakin menebalkan pengertian bahwa politik itu memang kotor, terutama bagi masyarakat awam.

Itulah dinamika kehidupan kemasyarakatan dan negara kebangsaan kita, yang tidak dapat lepas dari proses pemilu yang walaupun proses perjalanannya didewasakan dengan berbagai lika-liku proses politik perjalanan menjadi negara kebangsaan kita, yang semakin menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan penghayatan dan pengalaman arti pemilu dan pengertian politik yang sudah semakin baik. Sementara itu, "KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Sebanyak 171 daerah

akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun ini. Sesuai ketentuan perundang-undangan, bila pilkada, maka Kepala Daerah terpilih bersamasama dengan DPRD mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJMD sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi serta janji-janji kampanye untuk diserasikan menjadi satu kebijakan daerah dalam bentuk Perda. Senada dengan pilkada, dalam pileg juga demikian; setelah memenangkan suara sesuai aturan yang berlaku, caleg terpilih di DPRD kab/kota, DPRD Provinsi, DPR dan juga DPD, berusaha berjuang memikirkan kemajuan kebahagiaan masyarakat konstituennya dalam satu kesatuan konsep yang disebut sebagai kebijakan publik berupa produk perundang-undangan di tingkat nasional untuk DPR/DPD, perda provinsi untuk DPRD Provinsi dan perda kabupaten Kota, untuk DPRD Kabupaten Kota setempat.

Memasuki tahun politik sekarang inipun, mulai terasa adanya tanda ke arah kebenaran praktek, bahwa politik itu kotor. Praktek politik kotor semakin menjadi sasaran perhatian oleh pemerintah khususnya BAWASLU, Lembaga Swadaya Masyarakat, juga anggota masyarakat yang peduli terselenggaranya pemilu yang bersih, sehingga segala perbuatan politik ditelisik, seakan politik menonjol karena masyarakat terfokus, memonitor secara tajam, indikator adanya politik adalah perbuatan kotor sebagaimana disinyalir oleh :

1. Asrinaldi dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, dalam tulisan "Ancaman Politik Uang di Pilkada", yang menyatakan bahwa :  
Salah satu kekhawatiran dalam pemilihan kepala daerah serempak gelombang ketiga ini adalah semakin semaraknya

- politik uang. Bagaimana tidak, dari awal pencalonan saja sudah ramai diperbincangkan bagaimana partai politik meminta sejumlah uang kepada calon. ... .. Tidak ada cara bagi calon kepala daerah kecuali harus menyiapkan uang mahar ini jika ingin didukung, berikut uang untuk kampanye dan bahkan uang untuk memilih. Uang untuk memilih inilah yang sering dikaitkan dengan praktik politik uang yang akan disebar menjelang pencoblosan. Hampir setiap perhelatan demokrasi elektoral yang melibatkan massa selalu ditemukan praktik politik uang. (KOMPAS, Jumat, 26 Januari 2018, hal.7 kolom 1-3).
2. Uang suap yang diterima Wali Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Adriatma Dwi Putra diduga akan di bagikan ke masyarakat daam rangka kampanye ayahnya, Asrun yang menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Dari awal komunikasi ada permintaan uang dalam bentuk pecahan Rp.50.000,-.Prediksi penyidik, uang tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat, kata wakil ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta Jumat, 9/3/18. (KOMPAS, 10 Maret 2018, hal 4).
  3. Banyak anggota DPR yang tertangkap korupsi oleh KPK. Bahkan ada kasus yang melibatkan(mantan) ketua DPR dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar. Di dalam perhelatan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang digelar secara serentak, peran penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta aparat peradilan, tidak akan cukup untuk menaikan IPK apabila praktik ijon tender, mahar politik, dan sumber dana kampanye yang tidak jelas, terus terjadi dalam pesta demokrasi. (Waspadai Korupsi Politik, dalam KOMPAS, 23 february 2018, hal.3)
  4. Bahkan kegilaan, sekarang telah menjadi situasi normal di poitik. Arena politik terlalu sumpek dengan perilaku-perilaku menyebalkan yang tidak memperlihatkan kewarasan berpolitik. Paling jelas adalah perilaku koruptif. Teringat penggalan puisi Yudhistira ANM Massardi : Kegilaan masih bertingkah di Senayan/ korupsi masih jadi idiolog paling sexy / Koruptor masih jadi aktor paling tersohor, / Merekalah pemenang sejati democrazy. Bentuk-bentuk lain kegilaan politik, antara lain adalah maraknya kekerasan verbal, saling menghujat, menyebar kebencian, suka menyalahkan orang lain, bahkan suka mencela orang lain tanpa bisa menunjukkan keberhasilan diri sendiri. Kita percaya berbuat salah adalah manusiawi; Menyalahan orang laian, itulah politik. Kata Hubert Humphrey, wakil Presiden Amerika Serikat ke 38 (1965-1969).
  5. Jika di panggung politik begitu subur kegilaan-kegilaan dipertontonkan, terutama di tingkat elite politik, maka dalam budaya masyarakat yang patrimonial akan terasa di akan rumput.Pertarungan di tingkat elite akan berpindah (diikuti)di masyarakat bawah. (M.Subhan SD, kegilaan politik, dalam KOMPAS, 24 Februari 2018, hal.2).
- Demikian realitas kehidupan masyarakat di wilayah pemilihan umum setempat hampir selalu tak terelakkan, karena masyarakat jelata pada umumnya tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya dengan membiarkan hal itu terjadi dan

terulang terjadi lagi. Praktek politik uang sudah menjadi hal yang dianggap benar sehingga menjadi hal biasa tidak lagi menjadi hal yang tabu, artinya sampai pada kesimpulan masyarakat mulai berperilaku “membenarkan kebiasaan”, terhadap kegiatan politik uang.

Baharuddin, SE, menyebut “Money politics (politik uang) yaitu “sebuah proses di dalam politik yang membeli suara rakyat atau pemilih dengan cara memberikan sejumlah uang” (Baharuddin, SE dalam <http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>, print, 9 Maret 2018, jam 20.57.).

Sebuah proses yang berkembang di dalam politik yang berusaha membeli suara rakyat atau pemilih dengan cara memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih agar suara yang telah menerima uang tersebut diberikan kepada pemberi uang dengan cara mencentang/mencoblos gambar atau nomor yang dikehendaki oleh si pemberi uang. Dengan demikian calon yang berusaha untuk semakin mendapat pemilih yang semakin banyak, akan semakin berkesempatan untuk menang, karena kriteria pemenang pemilu, adalah calon yang mendapatkan jumlah suara yang semakin banyak, dengan kriteria minimal tertentu sesuai aturan yang berlaku.

Sekalipun banyak anjuran dari pakar politik, dan juga terutama dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Komisioner Pemilihan Umum (KPU), juga Panwaslu dan masyarakat peduli pemilu bersih, agar masyarakat tidak mudah terhasut oleh bujuk rayu sejumlah uang yang akan diberikan; tetapi masih lebih banyak anggota masyarakat yang karena keterbatasan pengetahuan,

jaringan dan jangkauan LSM, untuk “diterima uangnya, dan pilih yang dipercaya“, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi yang demikian ternyata yang semakin masuk ke dalam kehidupan rakyat jelata. Ironis, karena secara terbuka semua partai politik peserta pemilu, selalu menentang adanya praktek politik uang, dan menganjurkan agar masyarakat melaksanakan pemilu dengan jalan yang konstitusional, tetapi justru mereka jugalah yang mempraktekan celah-celah hukum untuk praktek politik uang itu selalu di upayakan, sehingga politik uang tersebut sulit untuk diberantas. Hal yang semakin jelas dan terang benderang membuat tanda-tanda dari timbulnya jenis bencana nasional baru yang akan segera lahir, bahkan kelahiran tanda itu lebih cepat dan lebih banyak hal tidak terduga, yaitu tanda-tanda akan tibanya bencana sosial politik, semakin menjadi nyata, karena sudah mulai mewabah kegilaan politik gila.

## **B. Kuropsi, Politik Uang, Hoax di Medsos dan Permasalahannya.**

Medsos menjadi sangat rawan terhadap rekayasa dan kejahatan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa dalam media sosial (medsos) walau memiliki aturan tetapi kenyataannya media ini dipergunakan dengan sangat bebas. Kebebasan yang bahkan cenderung melanggar aturan hukum positif yang berlaku di masyarakat luas dan cenderung terjadi pembiaran, terhadap adanya pelanggaran norma kesopanan dan norma lainnya, sehingga berkembang menjadi kejahatan. Sayangnya, “Rekayasa dan kejahatan ini tak otomaatis dapat dipidanakan, karena rumitnya transmisi informasi yang terciptaa dan ketak-mampuan hukum menjangkaunya. Ketika sisi gelap medsos telah nyata memecah belah masyarakat, belum ada pranata

hukum internasional ataupun nasional yang secara memadai dapat menanganinya.” (Agus Sudibyo Direktur Indonesia Media Watch, dalam KOMPAS, 3 Desember 2017, hal.7). Pembiaran yang terus menerus akan mengakibatkan semakin parah, sehingga kondisi demikian, bagai masyarakat tanpa aturan, kehidupan tanpa tanggungjawab sosial, karena terlalu bebas, sehingga orang tidak tahu hakekat hidupnya, sebagaimana di gambarkan sebagai berikut : “Orang bisa membidik secara membabi buta, orang juga bisa memilih secara rational cara hidup yang irrational, tetapi tingkah laku semacam itu pastilah tidak sepatasnya bagi seorang manusia. Itulah orang yang “Ora Weruh Ing Uripe” (tidak tahu hakekat hidupnya)”. (Dr.W.Poespoprodjo., SH., SS.,B.Ph.,L.Ph., Filsafat Moral, Pustaka Grafika, Bandung, 1998 : 40).

Bertumbuh suburnya tindak pelanggaran etika, moral dan hukum yang berupa tindak korupsi, politik uang, ujaran kebencian dan berita palsu/hoak di medsos, termasuk permasalahan dari integritas para penegakhukum, lebih banyak disebabkan oleh substitusi penyaluran rasa ketidak puasan masyarakat, terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintah/negara terutama dalam bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dalam melaksanakan pelayanan publik terutama pada pelayanan terhadap masyarakat, yang mengakibatkan timbulnya efek samping semakin dirasakan adanya ketidakadilan dalam bidang persoalan sosial ekonomi. “Kemajuan sosial ekonomi memang merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan lain, yang dianggap baik: apakah itu kebahagiaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum atau kehidupan yang lebih baik bagi

anak-anak. Pendidikan, untuk beberapa diantaranya paling sedikit, diperluas dan diperbaiki untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan kegiatan ekonomi modern.”(Amir Effendi Siregar, Ed. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991 : 4).

Oleh karena itu, akar permasalahan yang menyebabkan tumbuh kembangnya secara subur pelanggaran etika, mora dan hukum tersebut, segera di atasi bersama melalui pemberdayaan masyarakat terhadap mereka, sehingga hidupnya akan lebih bahagia.

Secara konseptual, “pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. ... Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b).menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c).berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.”(Edy Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama, Bandung, 2009 : 57-58).

Sejalan dengan metode pemberdayaan, yang mendukung atau bahkan bertujuan untuk memandirikan setiap anggota

masyarakat yang bertanggungjawab sosial tersebut, harus menjadi fokus gerakan pemberdayaan sehingga parameter utamanya, adalah setiap anggota masyarakat selain mandiri yang juga memiliki sifat tanggungjawab sosial, sebagai suatu idealisme yang harus dipegang teguh untuk direalisasikan. Oleh karena itu Idealisme juga dapat untuk menolak HOAKS dan sejenisnya. Sebagaimana anjuran “Jika menemukan informasi yang salah dari sebuah media, masyarakat diminta bersikap kritis terhadap media tersebut. Media dituntut tetap menjaga idealismenya ditengah proses adaptasi menghadapi perkembangan/perubahan teknologi informasi digital. IDIALISME dinilai dapat menjadi kunci untuk menghadang berita bohong (hoaks) di masyarakat. Dengan begitu fungsi media sebagai sumber rujukan dan sistem kontrol masyarakat, tetap terjaga. Media berfungsi sebagai *wacthdog* (anjing penjaga) kontrol sosial dan sumber informasi.” (Yekthi Hesthi Murthi, Ketua bidang Perempuan dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen, dalam KOMPAS, 10 Maret 2018).

### C. Strategi Memenangkan Pemilu, dalam Kondisi Kekinian.

Setiap kontestan pemilu, akan berusaha meraih simpati masyarakat pemilih, sedemikian rupa dalam berbagai peristiwa yang memungkinkan dirinya dikenal masyarakat pemilih, dan sampai masyarakat pemilih itu berkesimpulan dengan penuh keteguhan hati, untuk memutuskan akan memilih atau menyalurkan aspirasinya kepada seseorang yang telah dirasa cocok dan sejalan dengan harapan yang akan direalisasikan, bilamana person pilihannya itu (yaitu dirinya) meraih suara terbanyak dan menang. Maka untuk menuju kemenangan yang sebenarnya, kontestan perlu

mengambil langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, harus memiliki ketegasan untuk selalu mematuhi suara hati nurani yang pasti, yaitu : “Kepastian yang beralasan (prudential certitude) untuk menyingkirkan segala bentuk rasa takut yang beralasan untuk membuat kekeliruan, adalah lebih baik dibandingkan dengan suatu kemungkinan besar yang tidak bersih dari rasa takut yang beralasan. Maka suatu hati nurani yang pasti haruslah ditaati. ... Hatinurani adalah satu-satunya pembimbing yang dimiliki orang dalam melaksanakan perbuatan konkrit (di saat sekarang dan di sini)” (Dr.W.Poespoprodjo., SH., SS.,B.Ph.,L.Ph., Filsafat Moral, Pustaka Grafika, Bandung, 1998 : 248-249) Sedangkan substansi kepastian suara hati, akan selalu sama dari waktu-ke waktu, yaitu: kebenaran dari Yang Maha Kuasa yang terpateri didalam hati kita, sehingga disebut sebagai kata hati. Substansi materi dalam strategi pemilu agar menang yang terpuji/elegan, haruslah mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat yang searah dengan tuntutan perkembangan pada jamannya. Untuk saat ini sangat tepatlah bila strategi yang akan dipilih menjadi materi tawaran dalam kampanye pada masyarakat pemilih, adalah strategi penerapan yang mengedepankan :
  2. “tehnno-demokrasi”, sebagai berikut: akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang semakin modern, hidup kita manusia dimudahkan dengan beragam penemuan dan pola pikir yang

berkembang dari filsafat dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, orang semakin berkemampuan berfikir semakin logis, rasional, sistematis, dan kritis tentang proses kehidupan dan perkembangan dunia, sehingga kita harus memanfaatkan secara maksimal demi perkembangan demokrasi dan memerangi korupsi di Indonesia, sebagai salah satu bentuk/jenis tanggungjawab kita kepada Sang Pencipta terhadap alam ciptaan-NYA. Enam hal untuk meningkatkan mutu demokrasi kita, yang masuk dalam "Tehno-Demokrasi", yaitu : Pertama, birokrasi dan kepemimpinan politik, diganti dengan mesin dan komputer. Hal ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang paling efisien dan efektif kepada rakyat. Semua kemungkinan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, mati karena tidak ada ruang gerakanya. Kedua, beragam kebutuhan dasar rakyat, sandang, pangan, rumah diurus sepenuhnya oleh mesin dan komputer. Pertanian, distribusi pangan, sandang dan pembangunan perumahan dibuat sepenuhnya otomatis. Ketiga, uangpun tidak lagi digunakan. Semua orang mendapatkan apa yang diperlukannya untuk hidup layak sebagai manusia. Mereka bisa memilih pekerjaan yang sungguh terhubung dengan minat yang mereka punyai. Kerja, menjadi bagian dari pengembangan pribadi dan bukan menjadi budak dari sistem ekonomi kapitalis yang merusak habitat. Keempat, peran manusia tentu masih diperlukan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan hukum yang membutuhkan pertimbangan manusiawi yang

tidak dapat dilakukan oleh mesin. Mesin dan Komputer diciptakan supaya dpt mendampingi, tetapi membuat keputusan tetap memerlukan peran penting manusia yang memiliki nalar kritis untuk mempertimbangkan dengan berbagai keadaan tata nilai yang ada. Kelima, perhatian amat penting kepada mutu perangkat lunak ataupun keras yang menopang beragam sistem komputer dan mesin. Peran partisipasi seluruh rakyat, sangat mutlak penting, untuk selalu terjamin mendapatkan perangkat yang diperlukan terpenuhi dengan bermutu tinggi. Rakyat juga harus diberi ketrampilan memantau kinerja sistem komputer dan mesin, yang ada supaya tetap bersih, efektif dan efisien. Tugas ini lebih mudah daripada memantau jutaan karyawan/pekerja birokrasi dan politisi busuk. Keenam, membangun budaya berfikir kritis, logis, sistematis dan rasional dalam keluarga dan semua jenjang pendidikan yang ada, yang dibarengi dengan pembanagan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi tehno-demokrasi. (Reza AA Wattimena, Tehno-Demokrasi, dalam KOMPAS, 10 Maret 2018 hal.7)

3. Mencontoh perilaku kepemimpinan yang baik dan benar, bukan hal yang memalukan, tetapi merupakan hal yang bijak. Misalnya, mengambil Pelajaran Dari Korea Selatan. Jika betul-betul hendak memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi harus didukung hukum yang keras(tegas/berat). Korsel mencoba mewujudkannya dengan menerapkan Kim Young-Ran

Act, yang tanpa ampun memperluas cakupan mereka yang harus tunduk pada batasan gratifikasi. Dilaporkan bahwa orang di Korsel kini menjadi sangat hati-hati saat menerima undangan makan. Korupsi yang semula mudah menjangkiti orang, pelan-pelan kehilangan kemampuannya untuk menular. Namun yang lebih penting lagi adalah penegakan hukum. Proses hukum atas PARK memberikan contoh bahwa pemberantasan korupsi harus diwujudkan dengan penegakan aturan perundang-undangan yang tegas tanpa pandang bulu. (KOMPAS, 1 Maret 2018, hal.6).

#### D. Penutup

Strategi memenangkan pemilu, dimaksudkan adalah meraih capaian suara terbanyak, yang didahului dengan proses pendewasaan melalui pemberdayaan masyarakat pemilih. Masyarakat pemilih dengan sadar tanpa paksaan dan dengan gembira menikmati pesta demokrasi. Bila karena keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kemasyarakatan, maka mereka akan secara sadar, rakyat sebagai anggota masyarakat pemilih sadar/paham sudah melihat suasana kondusif, dengan sukarela bergembira datang ke TPSnya mengikuti proses yang belaku, sehingga pemilih dengan langkah tegas pasti dan terlindungi, melaksanakan hak pilihnya.

Suasana ini dapat terjadi karena pemilih telah memiliki kepastian yang dipilih memiliki program nyata yang dapat dilaksanakan untuk membahagiakan seluruh anggota masyarakatnya, tanpa hanya memikirkan masyarakat

konstituensi, suku, agama dan kebangsaan dalam arti sempit.

Sekalipun mungkin masih memerlukan proses yang panjang, karena beberapa kendala antara lain : Instrumen pemeriksaan terhadap keabsahan laporan dana kampanye masih belum memadai sehingga perlu pendekatan yang lebih sistemik guna memastikan dana didapat dari sumber legal serta besarnya tak melampaui ambang batas yang ditentukan. Tanpa hal itu, setiap gelombang pemilihan kepala daerah, pelaporan dana kampanye yang sekedar formalitas akan terus berulang. (mantan ketua KPU Juri Ardiantoro dalam KOMPAS, 10-03-2018 ha.7), sehingga memerlukan banyak waktu, tetapi pemikiran boleh mulai sekarang dan selanjutnya. Semoga.

#### Daftar Pustaka

- Amir Effendi Siregar, Ed., Arus Pemikiran Ekonomi Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991
- Edy Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Poespoprodjo., SH., SS.,B.Ph.,L.Ph. Dr.W., Filsafat Moral, Pustaka Grafika, Bandung, 1998
- KOMPAS, Jumat, 26 Januari 2018, hal.7 kolom 1-3
- KOMPAS, 10 Maret 2018, hal 4
- Waspada Korupsi Politik, dalam KOMPAS, 23 februari 2018, hal.3)
- M.Subhan SD, kegilaan politik, dalam KOMPAS, 24 Februari 2018, hal.2
- Yekthi Hesthi Murthi, Ketua bidang Perempuan dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen, dalam KOMPAS, 10 Maret 2018).
- Reza AA Wattimena, Tehno-Demokrasi, dalam KOMPAS, 10 Maret 2018 hal.7

KOMPAS, 1 Maret 2018, hal.6).  
mantan ketua KPU Juri Ardiantoro  
dalam KOMPAS, 10-03-2018  
ha.7)  
Agus Sudibyو Direktur Indonesia Media  
Watch, dalam KOMPAS, 3  
Desember 2017, hal.7  
Baharuddin, SE., dalam  
[http://news.rakyatku.com/read/637  
42/2017/09/02/  
dilema-politik-  
uang-vs-ongkos-politik](http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik), print, 9  
Maret 2018, jam 20.57.  
[https://niasrs.wordpress.com/tag/pemilu-  
menurut-para-ahli/](https://niasrs.wordpress.com/tag/pemilu-menurut-para-ahli/), print, 22 – 02 -  
2018, jam.08.06.)